



**Judul** : Usulan Rp 7,2 Triliun Hanya Berorientasi Proyek : Anggaran DPR Tak Layak Dinaikkan  
**Tanggal** : Jumat, 11 Agustus 2017  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : 9

## Usulan Rp 7,2 Triliun Hanya Berorientasi Proyek

# Anggaran DPR Tak Layak Dinaikkan

[JAKARTA] Langkah DPR melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengajukan anggaran Rp 7,2 triliun untuk 2018 diniilai hanya berorientasi proyek dan tidak berbasis kinerja.

"Perencanaan Anggaran DPR ini tidak berbasis Kinerja, kebutuhan sesungguhnya hanya Rp 4 triliun, dengan anggaran itu pun, kinerja DPR masih mengecewakan, tidak sesuai idealisme rakyat. Fungsi legislasi minim, fungsi anggaran masih sering disalahgunakan mafia anggaran, fungsi pengawasan justru untuk menyerang KPK. Saya rasa DPR tidak layak menaikkan anggaran," ujar Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi di Jakarta, Jumat (11/8).

Dijelaskan, Laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR 2018 dilayangkan saat rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu. RKA diserahkan ke pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin paripurna menanyakan persetujuan anggota DPR.

Anggaran sebesar Rp 7,2 triliun itu yakni untuk Anggaran Satuan kerja (Satker) DPR Rp 4,87 triliun dan anggaran Satker Setjen DPR senilai Rp 2,37 triliun. Ternyata, kata Apung, alokasi Rp 7,2 triliun belum jelas, diorentasikan untuk pembangunan gedung baru dan apartemen.

"Bau proyek gedung baru dan apartemen bangkit lagi dalam usulan Rp 7,2 triliun ini. Orientasi jelas pada proyek, bukan pada peningkatan kinerja DPR. Sangat disayangkan, mereka tidak menghormati rakyat sebagai konstituen dan pembayar pajak dengan menggunakan anggaran seefisien dan seefektif mungkin. Kami menolak mengajukan tambahan anggaran menjadi Rp 5,7 triliun atau 25% pada 2018 mendatang. Anggaran DPR tahun ini hanya mencapai Rp 4,26 triliun.

"Anggaran itu untuk satuan kerja dewan sebesar Rp 4

triliun. Sedangkan Rp 1,7 triliun untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR," ujar Anton, Kamis (10/8).

Politisi Golkar itu menyebutkan, anggaran itu tidak terlalu besar. Persentasenya hanya 0,34% dari total APBN. "Semua lah, gaji, dan lain-lain. Bikin saja untuk dewan, tenaga ahli, hingga staf.

Fadli menyebutkan, adanya penambahan tenaga ahli hingga staf administrasi membuat ruangan kerja anggota dewan menjadi semakin sempit. Wacana lainnya adalah pemindahan perumahan anggota dewan dari tanah milik Sekretariat Negara di Kalibata ke tanah bekas Kompleks Taman Ria Senayan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, kenaikan anggaran 2018 untuk program penataan kawasan Kompleks Parlemen. Anggota DPR nantinya tak perlu tinggal jauh dari Kompleks Parlemen sehingga tak membutuhkan kendaraan. [N-8/H-14]

**Rincian anggaran Rp 7,2 triliun yang diajukan DPR untuk tahun 2018:**

| Anggaran Satuan kerja (Satker) Dewan   | : Rp 4.870.544.977.000 |
|--|------------------------|
| 1. Program pelaksanaan fungsi DPR      | : Rp 1.158.260.928.000 |
| 2. Program pengeluaran kelembagaan DPR | : Rp 3.712.284.039.000 |

| Anggaran Satuan kerja (Satker) Setjen                   | : Rp 2.375.971.321.000 |
|---|------------------------|
| 1. Program Manajemen Pelaksanaan Teknis Lain Setjen DPR | : Rp 2.324.869.870.000 |
| 2. Program Dukungan Kehalihan Fungsi Dewan              | : Rp 51.101.451.000    |

Foto: ISTIMEWA

